BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 192/KEP/BSN/8/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 28A/KEP/BSN/2/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut atas Reviu Indikator Kinerja Utama Badan Standardisasi Nasional, maka perlu meninjau kembali Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 28A/KEP/BSN/2/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Standardisasi Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);

3. Peraturan. ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Kerja Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Keputusan ...

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

10. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 28A/KEP/BSN/2/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 28A/KEP/BSN/2/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2015
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN. ...

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
NOMOR :192/KEP/BSN/08/2015
TANGGAL : 5 Agustus 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

I. Badan Standardisasi Nasional

1. Tugas : melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Fungsi :
   a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional;
   b. pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
   c. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional;
   d. penyelenggaraan kegiatan kerja sama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi;
   e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.
3. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan		Sumber Data
1	Meningkatnya SNI yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan	1	Persentase SNI yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan Penjelasan : Jumlah SNI yang dimanfaatkan oleh : 1. regulator sebagai SNI wajib 2. pelaku usaha sebagai SNI sukarela untuk meningkatkan daya saing 3. pemangku kepentingan dalam	$P = \left(\frac{X}{Y}\right) x\ 100\%$	Keterangan : P : Persentase SNI yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan X : Jumlah SNI yang dimanfaatkan pada thn (n) Y : total SNI yang berlaku pada tahun (n)	Pusido, PALS, PALLI dan PSPS

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	Sumber Data
			kontrak, tender, pengujian, sertifikasi, dll sebagai referensi		
2	Bertambahnya jumlah SNI yang ditetapkan untuk dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan	2	Jumlah SNI yang ditetapkan	Jumlah SNI yang ditetapkan	Komiteteknis, BSN (HOH, Pusido)
3	Meningkatnya LPK yang mendukung penerapan SNI regulasi	3	Persentase peningkatan LPK yang mendukung penerapan SNI Penjelasan : Jumlah LPK yang dimaksud adalah LPK yang baru diakreditasi	$P = \left(\frac{Yn - Yo}{Yo}\right) x\ 100\%$ Keterangan : P : Persentase peningkatan LPK yang mendukung penerapan SNI Yn : Jumlah LPK tahun ke (n) Yo : Jumlah LPK tahun baseline	Kedeputian PSA
4	Bertambahnya pengakuan sertifikat di tingkat internasional	4	Jumlah skema akreditasi yang diakui (ekuivalen) di tingkat internasional	Jumlah skema akreditasi yang diakui pada tahun (n)	- MRA ILAC/APLAC - MLA IAF/PAC
5	Meningkatnya jumlah CMC yang tertelusur dan diakui di internasional	5	Jumlah lingkup pengukuran dan kalibrasi alat/standar fisik (CMC) yang diakui di tingkat internasional dan tertelusur ke satuan internasional	Jumlah CMC (Calibration Measurements Capability) yang dimuat dalam CIPM MRA Penjelasan : CMC adalah kemampuan pengukuran dan kalibrasi dengan sumber daya terbaik yang dimiliki oleh NMI NMI (*National Metrology Institute*) adalah pengelola standar nasional satuan ukuran tertinggi di suatu negara	*Appendix* CIPM

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan		Sumber Data
6	Meningkatnya budaya standar melalui peningkatan partisipasi dan kompetensi masyarakat di bidang SPK	6	Persentase peningkatan masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan SPK Penjelasan : Partisipasi masyarakat dalam keg. SPK yang terdiri dari: a: jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan SNI (konseptor, komtek, TAS, MASTAN), litbang dan kerjasama di bidang SPK b. jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam penerapan SNI dan penilaian kesesuaian (penerap SNI, pembina penerapan SNI,auditor/asesor, sdm di LPK) c.jumlah masyarakat yang berpartisipasi di dalam pemanfaatan informasi, diklat dan pemasyarakatan SPK I30	$P = \left(\frac{Xn - Xo}{Xo}\right) x\, 100\%$	Keterangan: P: Persentase peningkatan n : tahun berjalan Xn: jumlah partisipasi masy dalam keg. SPK pada tahun (n) Xo : jumlah partisipasi masy dalam keg. SPK pada tahun baseline	- Sestama - Kedeputian PKS - Kedeputian PSA - Kedeputian IPS
		7	Persentase peningkatan jumlah SDM yang kompeten di bidang SPK Penjelasan : Jumlah SDM yang kompeten di bidang SPK dihitung dari jumlah SDM yang mengikuti diklat, seminar, sosialisasi, workshop, bimbingan dan pendampingan di bidang SPK yang diselenggarakan oleh BSN dan atau bersama mitra BSN serta mendapat sertifikat dari BSN	$P = \left(\frac{Yn - Yo}{Yo}\right) x\, 100\%$	Keterangan: P : Persentase peningkatan n : tahun berjalan Yn: jumlah SDM yang kompeten pada tahun (n) Yo : jumlah SDM yang kompeten pada tahun baseline	- Sestama - Kedeputian PKS - Kedeputian PSA - Kedeputian IPS

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan		Sumber Data
7	Memastikan layanan fungsi notifikasi dan inquiry dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	8	Persentase penanganan permintaan layanan notifikasi dan inquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT WTO	$P = \left(\frac{X}{Y}\right) x\ 100\%$	Keterangan : P : SNI yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan X : Jumlah notifikasi dan tanggapan terhadap enquiryyang diselesaikan Y : jumlah permintaan notifikasi dan enquiry yang diterima	Kedeputian PKS, Kementerian/ Lembaga terkait, WTO, NB EP Anggota WTO, PTRI Jenewa

II. Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi

1. Tugas : melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perumusan standar, penelitian dan pengembangan serta kerjasama di bidang standardisasi.
2. Fungsi :
   a. perumusan kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, perumusan dan penetapan Standar Nasional serta kerjasama di bidang standardisasi;
   b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, perumusan dan penetapan standar nasional serta kerjasama di bidang standardisasi;
   c. pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan serta pengendalian kegiatan di bidang penelitian, pengkajian, dan kerjasama di bidang standardisasi, serta pengembangan, perumusan dan penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI);
   d. pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang standardisasi dengan badan-badan nasional dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan		Sumber Data
1	Meningkatnya RASNI yang siap ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan	1	Jumlah RASNI yang siap ditetapkan <u>Penjelasan :</u> RASNI adalah rancangan akhir SNI (RASNI) untuk SNI yang baru maupun SNI yang direvisi	Jumlah RASNI yang siap ditetapkan pada tahun n		PPS
2	Memastikan tersedianya rekomendasi hasil kerjasama yang mendukung pengembangan SNI	2	Persentase rekomendasi hasil kerjasama standardisasi yang mendukung pengambangan SNI.	$P = \left(\frac{X}{Y}\right) x\, 100\%$	Keterangan : P : Persentase rekomendasi tahun n X : rekomendasi hasil kerjasama standardisasi yang mendukung pengembangan SNI tahun n Y : total rekomendasi hasil kerjasama tahun n	PKS
3	Meningkatnya kerjasama bidang standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian di tingkat nasional, bilateral, regional dan internasional untuk	3	Jumlah kerjasama bidang standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian di tingkat nasional, bilateral, regional dan internasional.	Jumlah kesepakatan kerjasama bidang standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian pada tahun n		PKS

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan		Sumber Data
	mendukung kepentingan Indonesia di forum perdagangan global					
4	Memastikan fungsi notifikasi dan inquiry dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	4	Persentase penanganan permintaan layanan notifikasi dalam rangka memenuhi perjanjian TBT WTO (N%). <u>Penjelasan :</u> Notifikasi adalah suatu kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada sekretariat WTO terkait peraturan yang akan diberlakukan oleh anggota WTO yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap perdagangan anggota WTO lain.	$P = \left(\frac{X}{Y}\right) x\ 100\%$	Keterangan : P : Persentase penanganan notifikasi tahun n X : Jumlah notifikasi yang diselesaikan tahun n Y : jumlah permintaan notifikasi dan enquiry yang diterima tahun n	Kedeputian PKS, Kementerian/ Lembaga terkait, WTO, NB EP Anggota WTO, PTRI Jenewa
			Persentase penanganan permintaan layanan inquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT WTO. <u>Penjelasan :</u> Enquiry adalah permintaan informasi/tanggapan terkait regulasi teknis , standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang akan maupun telah ditetapkan Technical Barriers To Trade- TBT WTO adalah: Hambatan teknis perdagangan dibawah payung WTO yang merupakan bagian dari perjanjian WTO yang bertujuan agar standar prosedur penilaian kesesuaian dan regulasi teknis tidak menjadi hambatan dalam perdagangan.	$P = \left(\frac{X}{Y}\right) x\ 100\%$	Keterangan : P Persentase penanganan enquiry tahun n X : Jumlah tanggapan terhadap enquiry yang diselesaikan tahun n Y : jumlah enquiry yang diterima tahun n	

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan		Sumber Data
5	Memastikan tersedianya hasil penelitian mendukung pengembangan SNI, penilaian kesesuaian dan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)	5	Persentase hasil penelitian yang mendukung pengembangan SNI, penilaian kesesuaian dan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)	$P = \left(\frac{X}{Y}\right) x\ 100\%$	Keterangan : P : Persentase hasil penelitian tahun n X : hasil kajian atau penelitian yang mendukung pengembangan SNI, penilaian kesesuaian dan Standar Nasional Satuan Ukuran pada tahun n pada tahun n Y : total hasil penelitian tahun n	Puslitbang
6	Memastikan tersedianya hasil penelitian mendukung kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	6	Jumlah hasil penelitian yang mendukung kepentingan Indonesia di forum TBT WTO <u>Penjelasan :</u> Partisipasi masyarakat dalam keg. SPK yang terdiri dari: a: jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan SNI (konseptor, komtek, TAS, MASTAN), litbang dan kerjasama di bidang SPK b. jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam penerapan SNI dan penilaian kesesuaian (penerap SNI, pembina penerapan SNI,auditor/asesor, sdm di LPK) c. jumlah masyarakat yang berpartisipasi di dalam pemanfaatan informasi, diklat dan pemasyarakatan SPK I30	$P = \left(\frac{X}{Y}\right) x\ 100\%$	Keterangan : P : Persentase hasil penelitian tahun n X : hasil kajian atau penelitian yang mendukung pengembangan SNI, penilaian kesesuaian dan Standar Nasional Satuan Ukuran pada tahun n pada tahun n Y : total hasil penelitian tahun n	Puslitbang

III. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi

1. Tugas : melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penerapan standar dan akreditasi.
2. Fungsi :

   a. perumusan kebijakan di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi;
   b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi;
   c. pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan serta pengendalian kegiatan sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi serta penyediaan bahan acuan dan ketertelusuran sistem pengukuran;
   d. penyiapan rumusan penetapan, pembinaan, pemeliharaan dan tata cara kalibrasi standar nasional untuk satuan ukuran;
   e. penetapan dan pelaksanaan koordinasi laboratorium uji standar dan laboratorium metrologi selaku laboratorium acuan;
   f. pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama dengan badan-badan nasional dan internasional di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan		Sumber Data
1	Meningkatnya sertifikasi SNI yang diberikan kepada penerap SNI	1	Persentase kenaikan sertifikat SNI yang diberikan kepada penerap SNI	$P = \left(\frac{X \quad - X}{X}\right) x\, 100\%$	Keterangan : P : Persentase kenaikan sertifikat SNI yang diberikan kepada penerap SNI n: tahun berjalan Xn: Jumlah target sertifikasi SNI yang diberikan tahun ke (n) Xo : jumlah sertifikat SNI pada thn baseline	lembaga sertifikasi

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan		Sumber Data
2	Meningkatnya integritas tanda SNI yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan	2	Persentase jumlah sampel produk yang dimonitor dan memenuhi persyaratan SNI	$P = \left(\frac{X}{Y}\right) x\, 100\%$	Keterangan : P : Persentase jumlah sampel produk yang dimonitor dan memenuhi persyaratan SNI X : Jumlah sampel produk yang dimonitor dan memenuhi persyaratan SNI Y : Jumlah seluruh sampel produk yang dimonitor	hasil monitoring integritas tanda SNI
3	Meningkatnya jumlah LPK untuk mendukung penerapan SNI	3	Persentase pertumbuhan LPK yang diakreditasi	$P = \left(\frac{X \quad - X}{X}\right) x\, 100\%$	Keterangan : P : Persentase pertumbuhan LPK yang diakreditasi Xn: Jumlah LPK tahun ke n Xo: Jumlah lpk tahun baseline	Komite Areditasi Nasional (KAN)
4	Meningkatnya jumlah skema akreditasi yang diakui (ekuivalen) di tingkat nasional dan regional	4	Jumlah skema akreditasi yang diakui (ekuivalen) di tingkat nasional dan regional	Jumlah skema akreditasi yang diakui nasional dan regional pada tahun (n)		Komite Areditasi Nasional (KAN), Badan Standardisasi Nasional (BSN)
5	Meningkatnya jumlah skema akreditasi yang diakui (ekuivalen) di tingkat internasional	5	Jumlah skema akreditasi yang diakui (ekuivalen) di tingkat internasional	Jumlah skema akreditasi yang diakui pada tahun (n)		MRA ILAC/APLAC
6	Meningkatkan jumlah CMC *(Calibration Measurements Capability)* yang tertelusur dan diakui di internasional	6	Jumlah lingkup pengukuran dan kalibrasi alat/standar fisik (CMC) yang diakui di tk internasional dan tertelusur ke satuan internasional	Jumlah CMC yang dimuat dalam CIPM MRA		Appendix CIPM

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	Sumber Data
7	Meningkatkan jumlah SDM yang kompeten dalam penerapan standar penilaian kesesuaian	7	Jumlah SDM yang kompeten dalam penerapan standar penilaian kesesuaian	Jumlah SDM yang kompeten dalam penerapan standar penilaian kesesuaian pada tahun (n)	Komite Areditasi Nasional (KAN), Badan Standardisasi Nasional (BSN)

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

IV. Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi

1. Tugas : melaksanakan perumusan kebijakan di bidang informasi dan dokumentasi serta pendidikan dan pemasyarakatan standardisasi.
2. Fungsi :
   a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi, serta pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosi dan pemasyarakatan bidang standardisasi dan jaminan mutu;
   b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi, pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosi dan pemasyarakatan bidang standardisasi dan jaminan mutu;
   c. pemantauan, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan di bidang pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi, pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosi dan pemasyarakatan bidang standardisasi dan jaminan mutu;
   d. penyelenggaraan kegiatan informasi dan dokumentasi standardisasi;
   e. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pemasyarakatan standardisasi.
3. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan		Sumber Data
1	Meningkatnya persepsi, partisipasi dan kompetensi masyarakat di bidang SPK melalui penyebarluasan informasi dan dokumentasi, pendidikan, pelatihan serta pemasyarakatan	1	Tingkat persepsi terhadap standardisasi dari konsumen, pelaku usaha, regulator, dan akademisi/pakar	Angka skor indeks diperoleh melalui survey dengan skala 1-5		Survei
		2	Persentase peningkatan masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan SPK <u>Penjelasan :</u> Jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPK terdiri dari: - jumlah masyarakat yang berpartisipasi di dalam pemanfaatan informasi - diklat - pemasyarakatan SPK I30	$P = \left(\frac{X \quad - X}{X}\right) x\, 100\%$	Keterangan: P : Presentase peningkatan n : tahun berjalan Xn : jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPK pada tahun (n) Xo : jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPK pada tahun baseline	Kedeputian IPS

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan		Sumber Data
		3	Persentase peningkatan jumlah SDM yang kompeten di bidang SPK <u>Penjelasan :</u> Jumlah SDM yang kompeten di bidang SPK dihitung dari jumlah SDM yang mengikuti diklat, seminar, sosialisasi, workshop, bimbingan dan pendampingan di bidang SPK yang diselenggarakan oleh BSN dan atau bersama mitra BSN serta mendapat sertifikat dari BSN	$P = \left(\frac{X \quad - X}{Xo}\right) x\, 100\%$	Keterangan: P : Persentase peningkatan n : tahun berjalan Xn : jumlah SDM yang kompeten di bidang standardisasi pada tahun (n) Xo : jumlah SDM yang kompeten di bidang standardisasi pada baseline Catatan: Data 2014 (baseline) diperoleh dari :Pusdikmas : 800, Pusido : 150	BSN, Direktori LSP

V. Sekretariat Utama

1. Tugas : mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BSN.
2. Fungsi :
   a. koordinasi perencanaan program dan perumusan kebijakan di bidang standardisasi serta kebijakan teknis BSN;
   b. pembinaan dan pelayanan administrasi, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BSN;
   c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
   d. pembinaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, program kegiatan standardisasi, kerjasama fungsional dan antar lembaga terkait lainnya di lingkungan BSN;
   e. koordinasi dan penyusunan laporan BSN.
3. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas layananan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, perencanaan, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat	1	Indeks kepuasan layanan Sestama untuk internal (kepegawaian, keuangan, rumah tangga, hukum) dengan skala 1-100	Angka skor indeks diperoleh melalui survey dengan skala 1-100	Hasil survei
2	Meningkatnya kualitas penerapan e-govt dalam pelaksanaan Tusi Sestama	2	Indeks kepuasan penerapan e-govt dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sestama	Angka skor indeks diperoleh melalui survey dengan skala 1-100	Hasil survei
3	Meningkatnya kualitas Layanan informasi publik	3	Indeks kepuasan layanan informasi publik dengan skala 1-100	Angka skor indeks diperoleh melalui survey dengan skala 1-100	Hasil survei
4	Pengelolaan keuangan yang akurat dan akuntabel	4	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan	BPK
5	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja BSN	5	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	KemenPAN & RB

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan		Sumber Data
6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan RB	6	Tingkat pelaksanaan RB	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan RB oleh Menpan RB		KemenPAN & RB
7	Tersedianya peraturan perundangan-undangan	7	Jumlah Peraturan pelaksanaan UU 20/2014	Jumlah Peraturan pelaksanaan UU 20/2014		Biro HOH
8	Meningkatnya kualitas SDM yang kompeten	8	Persentase SDM BSN yang nilai SKPnya > 80 (baik)	$P = \left(\frac{X}{Y}\right) x\, 100\%$	Keterangan : P : Persentase SDM BSN yang mendapat nilai SKP > 80 (baik) X : Jumlah SDM BSN yang mendapat nilai SKP > 80 (baik) Y : Total SDM BSN	Biro HOH
9	Meningkatnya kompetensi SDM BSN	9	Persentasi SDM BSN yang meningkat kompetensinya	$P = \left(\frac{X}{Y}\right) x\, 100\%$	Keterangan : P : Persentasi SDM BSN yang meningkat kompetensinya X : jumlah SDM BSN yang mengikuti pelatihan teknis/manajerial Y : Total SDM BSN	Biro HOH

VI. Inspektorat

1. Tugas : melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN.
2. Fungsi :
   a. penyusunan program pengawasan yang meliputi anggaran, kepegawaian, perlengkapan, dan akuntabilitas;
   b. pelaksanaan pengawasan anggaran, kepegawaian, perlengkapan dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
   c. penyusunan laporan hasil pengawasan;
   d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat.
3. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan		Sumber Data
1	Terselenggaranya perbaikan pengelolaan kegiatan dan program di lingkungan BSN, melalui Tindak Lanjut Hasil Audit	1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Internal	$P = \left(\frac{X}{Y}\right) x\ 100\%$	Keterangan : P : Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Internal X : Jumlah Penyelesaian TLHA Y : Jumlah TLHA	Laporan TLHA
2	Terselenggaranya perbaikan pengelolaan kegiatan dan program di lingkungan BSN, melalui Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	$P = \left(\frac{X}{Y}\right) x\ 100\%$	Keterangan : P : Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan X : Jumlah Penyelesaian TLHP Y : Jumlah TLHP	Laporan TLHP
3	Terselenggaranya penyusunan rencana pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal unit kerja di BSN.	3	Jumlah Dokumen Rencana Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Unit Kerja di BSN	Jumlah Dokumen Rencana Pelaksanaan		Dokumen Rencana Pelaksanaan
4	Terselenggaranya Tindak Lanjut Rencana Tindak Pengendalian di unit kerja	4	Rata-rata persentase penyelesaian tindak lanjut Rencana Tindak Pengendalian	$R = \left(\frac{X}{Y}\right) x\ 100\%$	Keterangan : R : Rata-rata persentase penyelesaian tindak lanjut Rencana Tindak Pengendalian X : Jumlah PenyelesaianTL RTP Y : Jumlah RTP	Laporan Tindak Lanjut Rencana RTP
5	Terselenggaranya Tindak Lanjut penyelesaian rencana	5	Persentase Penyelasaian tindak lanjut rencana aksi Reformasi	$P = \left(\frac{X}{Y}\right) x\ 100\%$	Keterangan : P : Persentase Penyelasaian tindak	Laporan Tindak Lanjut rencana

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan		Sumber Data
	aksi Reformasi Birokrasi		Birokrasi		lanjut rencana aksi Reformasi Birokrasi X : Jumlah Penyelesaian tindak lanjut rencana aksi RB Y : Jumlah rencana aksi RB	aksi Reformasi Birokrasi
6	Terselenggaranya Tindak lanjut aduan masyarakat	6	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut aduan masyarakat	$P = \left(\frac{X}{Y}\right) x\ 100\%$	Keterangan : P : Persentase Penyelesaian Tindak lanjut aduan masyarakat X : Jumlah Penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat yang tepat waktu Y : Jumlah aduan masyarakat	Laporan Tindak Lanjut aduan masyarakat
7	Terselenggaranya Tindak lanjut aduan melalui WBS	7	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut aduan melalui WBS	$P = \left(\frac{X}{Y}\right) x\ 100\%$	Keterangan : P : Persentase Penyelesaian Tindak lanjut aduan melalui WBS X : Jumlah Penyelesaian tindak lanjut rencana aksi RB Y : Jumlah rencana aksi RB	Laporan Tindak Lanjut aduan melalui WBS
8	Terselenggaranya Tindak lanjut pengelolaan gratifikasi	8	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut pengelolaan gratifikasi	$P = \left(\frac{X}{Y}\right) x\ 100\%$	Keterangan : P : Persentase Penyelesaian Tindak lanjut pengelolaan gratifikasi X : Jumlah laporan yang ditelaah tepat waktu Y : Jumlah laporan gratifkasi	Laporan Tindak Lanjut pengelolaan gratifkasi

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan		Sumber Data
9	Terselenggaranya Tindak lanjut penanganan benturan kepentingan	9	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut penanganan benturan kepentingan	$P = \left(\frac{X}{Y}\right) x\ 100\%$	Keterangan : P : Persentase Penyelesaian Tindak lanjut penanganan benturan kepentingan X : Jumlah keputusan yang dilaksanakan Y : Jumlah keputusan	Laporan Tindak Lanjut penanganan benturan kepentingan

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA